

KONSEP, PARADIGMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

SUWARDI, SLAMET RIYADI, NURADILAH

Universitas Ekasakti

suwardi531@gmail.com, slametriyadiabizizi@gmail.com, nuradilahumizizi@gmail.com,

Abstract: *This research explains, it is necessary to make innovative-creative thinking regarding an integrated education system development model, which can mix and accommodate efforts to improve and achieve various educational policies (equitable and expanding access to education, improving the quality of education, relevance of education, etc.) targeted) together, not partially and sequentially, including its sustainability aspects. The results of increasing and achieving equity and expanding access to education, need to be accompanied by improving the quality of education (with a massive quality improvement model, for example), but also need to pay attention to aspects of relevance (by, for example, matching the curriculum with existing empirical, by updating the syllabus every year once, even without changing the formal curriculum). The sustainability aspect also needs to be considered, so that the implementation of a policy does not only depend on whether there is a subsidy from the center, while when subsidies are eliminated or revoked, for example, then it does not work. Furthermore, the success of education is also inseparable from aspects of leadership (leadership). So that in this case the selected policy makers should be those who side with education and not those who do not have a vision for the world of education. Choosing officials or leaders with character and justice is one of the efforts to improve people's political education.*

Keywords: *Concept, Paradigm, Implications, Educational Development.*

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan, perlu membuat pemikiran inovatif-kreatif mengenai model pembangunan sistem pendidikan yang terintegrasi, yang dapat meramu sekaligus mengakomodasi upaya peningkatan dan pencapaian berbagai kebijakan pendidikan (pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan, dan lain-lain yang ditargetkan) secara bersama-sama, bukan secara parsial dan berurutan, termasuk aspek sustainability (keberlanjutan) nya. Hasil peningkatan dan pencapaian pemerataan dan perluasan akses pendidikan, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan (dengan model peningkatan kualitas yang massive, misalnya), tapi juga perlu memperhatikan aspek relevansi (dengan, misalnya, mencocokkan kurikulum dengan empirik yang ada, dengan mengupdate silabus setiap tahun sekali, meski tanpa merubah kurikulum formalnya). Aspek keberlanjutannya perlu juga dipikirkan, jangan sampai berjalannya sebuah kebijakan hanya tergantung pada ada tidaknya subsidi dari pusat, sementara ketika subsidi ditiadakan atau dicabut, misalnya, lalu tidak berjalan. Lebih lanjut, keberhasilan pendidikan juga tidak terlepas dari aspek kepemimpinan (*leadership*). Sehingga dalam hal ini para pembuat kebijakan (*policy maker*) yang dipilih hendaklah merupakan mereka yang berpihak pada pendidikan dan bukan mereka yang tidak memiliki visi terhadap dunia pendidikan. Memilih pejabat atau pemimpin yang berkarakter dan berkeadilan adalah salah satu upaya dalam meningkatkan pendidikan politik rakyat.

Kata Kunci: Konsep, Paradigma, Implikasi, Pembangunan Pendidikan.

A. Pendahuluan

Agar dampak positif dapat benar-benar terwujud, kemampuan perencanaan pendidikan yang baik di daerah sangatlah diperlukan. Dengan kemampuan perencanaan pendidikan yang baik diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan yang serius. Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomi berpotensi memunculkan masalah: perbenturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menurunnya mutu pendidikan,

inefisiensi dalam pengelolaan pendidikan, ketimpangan dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya gerak dan ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta berkurangnya tuntutan akuntabilitas pendidikan oleh pemerintah serta meningkatnya akuntabilitas pendidikan oleh masyarakat.

Selain itu, dengan perencanaan yang baik, konon, merupakan separoh dari kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang telah diotonomikan di daerah. Sayangnya, (Madjid : 2013), berpendapat bahwa rendahnya mutu pendidikan kita disebabkan oleh belum komprehensifnya pendekatan perencanaan yang digunakan. Perencanaan pendidikan, katanya, hanya dijadikan faktor pelengkap atau dokumen "tanpa makna" sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Dapat juga terjadi, seperti dinyatakan H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa "pembuatan implementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh para eksekutif tanpa penelitian lebih dahulu. Kemungkinan resikonya beragam, misalnya membuat kesalahan yang sama dengan eksekutif terdahulu, tidak realistis, tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, sampai ke dugaan manipulatif-koruptif".

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human Investmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik. Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan, yang akan menjelaskan tentang konsep, paradigma dan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Perencanaan yang baik, merupakan kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Tentu hal ini menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan.

C. Hasil dan Pembahasan

Niels Mulder (2003) menyebutkan bahwa sering, bahan pelajaran tidak selaras dengan kenyataan hidup. Fakta bahwa perkembangan masyarakat kota digerakan pasar tidak tercerminkan dimana pun dalam bahan pengajaran; hal ini juga jelas terlihat dari dimasukkannya pendidikan nilai belum lama ini. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik. Secara

umum fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik.

Pertama, karakter adalah sesuatu yang dipelajari bukan bawaan alamiah yang dibawa sejak lahir. Sehingga karakter ini dapat berkembang melalui proses pembelajaran dan pembiasaan. Kedua, unsur-unsur yang membentuk karakter suatu suku bangsa merupakan suatu nilai luhur yang khas dari suatu bangsa itu sendiri yang diwujudkan dalam adat istiadat, cita-cita hidup dan kearifan lokal. Ketiga, setiap karakter memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penguatan dan penanaman nilai-nilai luhur karakter suatu suku bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui proses sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan, pembudayaan dan kerjasama. Nilai-nilai pendidikan karakter perlu diintegrasikan dalam pembelajaran para peserta didik di kelas pada semua bidang studi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Nilai-nilai ini dapat diinternalisasikan mulai dari kegiatan pembukaan, inti hingga kegiatan penutup. Proses menanamkan nilai-nilai ini dapat dilakukan pada aspek kognitif dan afektif melalui pemahaman materi dan penerapan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dinilai dari proses pembelajaran maupun pembiasaan.

Bangsa Indonesia juga sangat mempunyai kebudayaan lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam oleh sebab itu sebagai penerus kita wajib menjaganya karena ketahanan kebudayaan lokal berada pada generasi mudanya dan jangan sampai kita terbuai apalagi terjerumus pada budaya asing karena tidak semua budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bahkan tidak sedikit kebudayaan asing membawa dampak negatif. Sebagai negara kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara masyarakat. Namun hal itu pasti bisa terwujud jika kita peduli untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikan sehingga kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh negara lain karena kebudayaan tersebut merupakan identitas suatu bangsa dan negara.

Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung adalah penampilan kebudayaan-kebudayaan daerah di setiap event-event akbar nasional, misalnya tari-tarian, lagu daerah, dan sebagainya. Semua itu harus dilakukan sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda, bahwa budaya yang ditampilkan itu adalah warisan dari leluhurnya. Bukan berasal dari negara tetangga. Demikian juga upaya-upaya melalui jalur formal pendidikan. Masyarakat harus memahami dan mengetahui berbagai kebudayaan yang kita miliki. Pemerintah juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah.

Selain hal-hal tersebut di atas, masih ada berbagai cara dalam melestarikan budaya, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.
2. Lebih mendorong kita untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya
3. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramah-tamahan dan solidaritas yang tinggi.
4. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah.
5. Mengusahakan agar semua orang mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Kebudayaan lokal Indonesia adalah kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan setiap kebudayaan mempunyai ciri khas masing-masing.

Upaya membangun karakter pemuda berbasis kearifan budaya lokal sejak dini melalui jalur pendidikan dianggap sebagai langkah yang tepat. Sekolah merupakan lembaga formal yang menjadi peletak dasar pendidikan. Pendidikan di Sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peranan yang amat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan di Sekolah diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Jika menilik pada tujuan pendidikan nasional, maka

manusia yang berkualitas tidak hanya terbatas pada tataran kognitif, tetapi juga afektif dan psikomoto.

Paradigma pendidikan yang bersifat analisis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Meka Fns melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, ijazah.

Paradigma pendidikan Input-Proses-Output, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan raw-input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai instrumental input. Jika raw-input dan instrumental input baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produk yang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat partial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Sudah barang tentu asumsi tersebut jauh dari realitas dan salah. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar berhasil melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan dluji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai *engine of growth*, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori (*text bookish*)).

D. Penutup

Pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul *Education versus Qualifications* menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik. Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (*Erratic*). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Astiz, M.F., Wiseman, A.W. and Baker, D.P. (2002). Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education Systems. *Comparative Education Review*, vol. 1, no. 1, 66-86.
- Fasli, Jalal & Supriadi Dedi. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita.
- Fakih, Mansour. (2001). "Ideologi dalam Pendidikan : sebuah pengantar", dalam William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fiala, Robert, and Audri Gordon-Lanford. (1987). "Educational Ideology and the World Educational Revolution, 1950–1970." *Comparative Education Review* 31 (3): 315–32.
- Grundy, Shirley. (1987). *Curriculum: Product Or Praxis*. Routledge.
- Hanson, E.M (1998). *Educational Reform and Administrative Development : The Case of Columbia and Venezuela*, Stanford : Hoover Institution Press Stanfor Univercity.
- Hanson, E.M. (2000, October). Educational Decentralization Around the Pacific Rim. *Journal of Educational Administration*, Vol. 38, No. 5.
- Heywood, A. (2007) *Political Ideologies: An introduction*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Jepperson, Ronald L. 2002. "The Development and Application of Sociological Neoinstitutionalism." Pp. 229-266 in *New Directions in Contemporary Sociological Theory*, edited by J. Berger & M. Zelditch, Jr. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.